

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kemiskinan

###### 1) Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana sekelompok orang memiliki tingkat pendapatan yang rendah, selain itu juga memiliki akses yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan maupun terhadap kegiatan ekonomi yang produktif. Dalam mengukur kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Handayani, 2024).

###### 2) Kemiskinan dalam Islam

Pandangan Islam terhadap kemiskinan berbeda dengan pandangan konvensional. Jika secara konvensional kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana kekurangan materi, sedangkan dalam sudut pandang islam mengartikan kemiskinan tidak hanya tentang kekurangan materi saja , tetapi juga diliat dari segi spiritual dan moral.

Kemiskinan spiritual diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Allah SWT. Dalam menilai spiritual seseorang dapat dilihat dari tingkat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Sedangkan kemiskinan moral diartikan sebagai keadaan seseorang yang terjerumus ke hal-hal negatif yang bertentangan dengan norma kemasyarakatan dan ajaran islam (Zunaidi et al., 2023).

Islam juga menganggap bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah ketidakmampuan manusia dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Allah SWT telah menganugerahkan sumber daya alam yang melimpah baik dari daratan, lautan maupun langit yang diperuntukan bagi para umat manusia agar dimanfaatkan dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Q.S. al-Jatsiyah ayat 13 :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتٍ

لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُو

Artinya : “Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Sebenarnya kemampuan atau ilmu manusia lah yang masih terbatas untuk memanfaatkan atau mengekspolarasi sumber daya alam sehingga manusia terjerat dalam kemiskinan. Maka dari itu tingkat

pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang dapat memanfaatkan dengan baik sumber daya alam yang dilimpahkan oleh Allah SWT. Selain itu juga terkadang masih banyak golongan manusia tertentu yang serakah dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan dan keuntungan yang di dapat juga untuk mereka semua, sehingga golongan masyarakat lain, khususnya masyarakat miskin tidak dapat menikmati atau memanfaatkan sumber daya alam dengan maksimal (Majid, 2011).

### 3) Teori Kemiskinan

#### a. Teori Neo Liberal

Teori ini berpendapat bahwa permasalahan kemiskinan merupakan suatu persoalan individual yang disebabkan oleh pilihan individu tersebut. Maksudnya individu tersebut tidak mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada di pasar yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan, pendidikan, atau motivasi. Berdasarkan teori ini kemiskinan dapat berkurang jika kekuatan pasar diperluas dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan.

Cara penanganan kemiskinan menurut teori ini yakni secara langsung melalui keluarga, kelompok swadaya atau lembaga-lembaga. Negara hanya sebagai penjaga dan baru boleh campur

tangan jika lembaga-lembaga tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya (Sayifullah & Tia, 2016).

b. Teori Sosial Demokrat

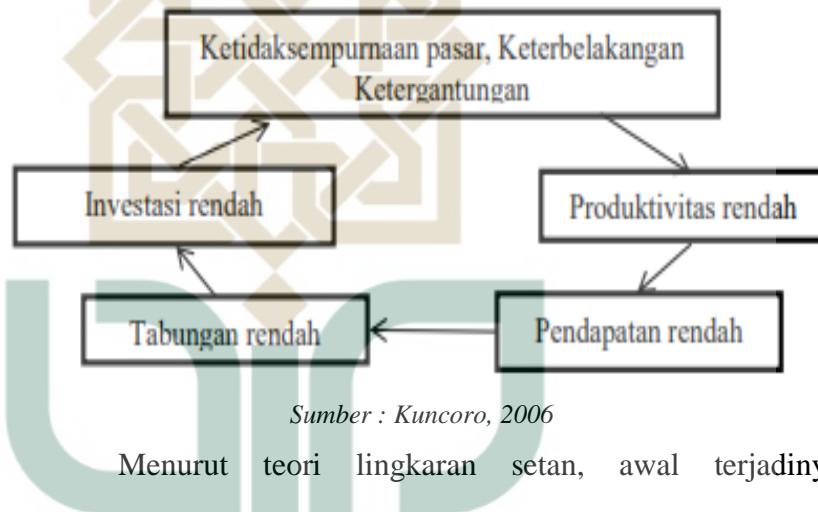
Teori ini berpendapat bahwa permasalahan kemiskinan bukan persoalan individual, melainkan sebuah persoalan struktural. Maksudnya adalah kemiskinan disebabkan dari tatanan struktur sosial yang tidak adil dan menghalangi suatu golongan untuk mengakses sumber-sumber kemasyarakatan. Para pendukung teori sosial demokrat ini berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting untuk memperoleh kebebasan. Terwujudnya kebebasan dapat dicapai jika setiap orang dapat menjangkau sumber-sumber yang ada seperti pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu berdasarkan teori ini negara memiliki peran penting untuk menjamin semua warganya memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengakses sumber-sumber yang dimiliki oleh negara (Sukidjo, 2009).

c. Teori Lingkaran Setan (*Vicious Cycle of Poverty*)

*Vicious Cycle of Poverty* atau biasa dikenal dengan Teori Lingkaran Setan merupakan sebuah teori tentang kemiskinan yang dikemukakan oleh seorang ekonom dari Swedia yaitu Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di suatu negara atau sekelompok masyarakat diakibatkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan sehingga

akan memperkuat kemiskinan itu sendiri dan pada akhirnya negara atau sekelompok masyarakat tersebut akan terjebak dalam kemiskinan. Maka dari itu terdapat sebuah kutipan dari Nurkse, “*A poor country is poor because it is poor*” yang artinya negara miskin akan tetap menjadi miskin. Berikut terdapat skema dari lingkaran setan kemiskinan :

**Gambar 2. 1 Skema Lingkaran Setan Kemiskinan**



Menurut teori lingkaran setan, awal terjadinya kemiskinan disebabkan oleh terciptanya kondisi ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, dan ketergantungan di suatu daerah. Hal tersebut dapat menciptakan kondisi yang tidak ideal pada perekonomian. Kondisi ini akan membuat masyarakat miskin memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya dan juga modal, yang mana pada akhirnya akan menurunkan produktivitas mereka. Ketika produktivitas menurun, tentu juga akan menurunkan tingkat pendapatan sehingga otomatis tabungan juga rendah. Tabungan yang rendah membuat masyarakat miskin

tidak dapat melakukan investasi yang cukup di beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, dll. Hal ini dapat menurunkan kualitas mereka dari segi sumber daya manusia (SDM) bahkan dampaknya juga dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya. Hal ini akan terus menerus berputar layaknya sebuah lingkaran dan akan terus menjerat masyarakat miskin (Lindrianti, 2022).

#### 4) Jenis-Jenis Kemiskinan

Kondisi kemiskinan dibagi menjadi 4 jenis, diantaranya sebagai berikut (Jacobus et al., 2019):

##### a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan. Garis kemiskinan merupakan pengeluaran atau konsumsi rata-rata dalam memenuhi standar kesejahteraan yang mana biasanya standar ini ditetapkan oleh pemerintah. Kemiskinan jenis ini juga biasanya dijadikan kriteria untuk menetapkan apakah seseorang miskin atau tidak.

##### b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif merupakan suatu kondisi kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak merata dan menyeluruh sehingga tidak dapat menjangkau seluruh lapisan

masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan kesejahteraan. Biasanya daerah-daerah yang tidak terjangkau pembangunan disebut daerah tertinggal.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan Struktural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang diakibatkan oleh terbatasnya akses terhadap sumber daya bagi individu atau sekelompok orang tertentu. Jenis kemiskinan ini biasanya terdapat unsur diskriminatif didalamnya.

d. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang diakibatkan oleh individu atau sekelompok orang tersebut karena adanya pengaruh budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk diajak memperbaiki taraf hidup dengan cara yang modern.

5) Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, diantaranya sebagai berikut (Adawiyah, 2020):

a. Faktor Individual

Faktor ini terkait dengan individu seseorang seperti fisik dan psikologis. Berdasarkan faktor individual ini kemiskinan disebabkan karena mereka terjebak dalam perilaku dan pilihannya yang membuat sulit keluar dari kemiskinan. Misalnya mereka

memiliki pendidikan atau keterampilan yang rendah dan kesehatan yang buruk sehingga sulit untuk bersaing di dunia kerja.

b. Faktor Sosial

Faktor ini berkaitan dengan kondisi lingkungan sosial yang dapat membuat seseorang sulit untuk mencapai kesejahteraan. Misalnya terjadinya diskriminasi usia, gender, suku atau etnis yang membuat individu atau sekelompok orang sulit untuk mengakses sumber daya sehingga mereka terjebak kemiskinan. Selain itu kondisi sosial dan ekonomi keluarga individu tersebut dapat menimbulkan kemiskinan secara turun temurun atau antar generasi.

c. Faktor Struktural

Faktor ini berkaitan dengan sistem atau kebijakan di suatu daerah yang tidak adil sehingga menyebabkan individu atau sekelompok orang tertentu mengalami kemiskinan. Misalnya sulitnya warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan karena terdapat pekerja asing sehingga dapat menurunkan tingkat pendapatan dan pada akhirnya muncul kemiskinan.

d. Faktor Kultural

Faktor ini berkaitan dengan kultur, budaya atau kebiasaan yang dapat menyebabkan kemiskinan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh seorang antropolog dari Amerika yaitu Oscar Lewis, bahwa orang miskin memiliki kebiasaan yang berbeda

dengan kebanyakan orang. Sikap pemalas, tidak memiliki etos kerja, menyerah pada nasib, dan selalu bergantung dengan orang lain sering dimiliki oleh orang-orang miskin.

## 2. Pengangguran

### 1) Pengertian Pengangguran

Pengangguran yaitu sebuah kondisi dimana seorang individu tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan sebuah usaha, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (BPS, 2021).

### 2) Pengangguran dalam Islam

Pengangguran merupakan suatu permasalahan ekonomi yang dapat menghambat kemajuan suatu negara. Pengangguran juga merupakan salah satu faktor dalam munculnya kemiskinan. Bahkan agama Islam pun juga melarang dan memperingatkan kepada umatnya untuk tidak menganggur dan harus bekerja untuk mencari rezeki. Hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Q.S. At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib

*dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”*

Islam mengharuskan seluruh umatnya untuk bekerja jika sudah mencapai usia kerja. Bekerja juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, karena bekerja merupakan bentuk mencari rezeki dari Allah SWT dengan catatan pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam melarang umatnya menjadi pengangguran dikarenakan Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan agar dapat menjadi manfaat, sehingga dengan bekerja setidaknya dapat memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Selain itu pengangguran juga dapat menciptakan kebiasaan bergantung kepada orang lain padahal islam tidak mengajurkan hal tersebut, apalagi sampai mengemis atau meminta-minta (Anggraini et al., 2023).

### 3) Teori Pengangguran Keynes

Menurut teori Keynes pengangguran dipicu oleh pasar tenaga kerja yang tidak seimbang karena upah yang tidak fleksibel, sehingga antara permintaan dan penawaran juga tidak akan seimbang. Kondisi ini dapat menciptakan rendahnya permintaan agregat yang mencakup konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor netto yang mana hal ini juga dapat menghambat perekonomian. Rendahnya permintaan agregat membuat perusahaan akan menurunkan

produksinya dan dampaknya akan terjadi pengurangan tenaga kerja. Hal ini juga dapat mengurangi kesempatan bekerja, karena dengan produksi yang menurun tentu perusahaan tidak mampu lagi untuk menyerap tenaga kerja dan dari sini-lah pengangguran akan muncul, bahkan bisa terus bertambah jumlahnya karena kesempatan kerja yang semakin berkurang (Munarni, 2024). Dalam mengatasi hal ini, Keynes juga berpendapat bahwa pemerintah harus ikut serta atau turut berpartisipasi. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dapat melakukan berbagai macam langkah-langkah, seperti membuat kebijakan untuk memperluas kesempatan bekerja sehingga angka pengangguran dapat menurun (Qausar&Aminda, 2022).

#### 4) Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Sadorno Sukino pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya sebagai berikut (Sejati, 2020):

##### a. Pengangguran Friksional

Pengangguran Friksional merupakan jenis pengangguran yang terjadi akibat kesenjangan antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Kesenjangan ini berupa waktu, informasi atau jarak yang mempengaruhi proses pencarian kerja. Pengangguran jenis biasanya bersifat sementara dan merupakan hal yang normal di pasar tenaga kerja.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran Struktural merupakan jenis pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan sistem atau struktur ekonomi di suatu wilayah atau negara. Misalnya perubahan permintaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja yang ada karena beberapa faktor seperti kemajuan teknologi dan perubahan kebijakan ekonomi.

c. Pengangguran Siklis

Pengangguran Siklis merupakan jenis pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya fluktuasi dalam siklus perekonomian, terutama ketika sedang mengalami resesi atau keterlambatan.

Pada saat terjadi resesi ekonomi biasanya permintaan terhadap barang dan jasa akan menurun, sehingga perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa otomatis akan mengurangi jumlah produksinya. Dalam situasi seperti ini biasanya perusahaan juga akan melakukan pengurangan jumlah karyawan.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran Teknologi merupakan jenis pengangguran yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Contohnya seperti tenaga kerja manusia yang mulai digantikan oleh mesin-mesin atau robot canggih karena dengan menggunakan robot dapat meningkatkan produktivitas.

e. Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka merupakan jenis pengangguran yang diakibatkan melonjaknya jumlah tenaga kerja, tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah tenaga kerja.

f. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran Tersembunyi atau biasa sering disebut dengan pengangguran terselubung merupakan jenis pengangguran yang mana seorang individu atau tenaga kerja memiliki pekerjaan tetapi tidak bekerja secara optimal. Maksudnya ketika jumlah tenaga kerja dalam suatu kegiatan ekonomi atau pekerjaan melebihi jumlah yang dibutuhkan agar dapat menjalankan kegiatannya secara efisien.

g. Pengangguran Musiman

Pengangguran Musiman merupakan jenis pengangguran yang mana seorang individu atau tenaga kerja hanya akan bekerja di waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti nelayan, yang mana ketika musim hujan atau sedang badai mereka tidak akan berlayar karena arus dilaut sangat besar dan sangat beresiko untuk melayar. Maka dari itu mereka akan menganggur.

h. Setengah Menganggur

Pengangguran jenis ini merupakan jenis pengangguran yang mana seorang individu atau tenaga kerja yang hanya bekerja di masa tertentu, misalnya hanya bekerja 2 – 3 hari dalam seminggu.

### 5) Faktor-Faktor Penyebab Pengangguran

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pengangguran, diantaranya sebagai berikut (Franita, 2016):

a. Lapangan pekerjaan yang terbatas

Jumlah lapangan pekerjaan yang lebih sedikit daripada jumlah penduduk atau tenaga kerja menjadi salah satu faktor munculnya pengangguran. Apalagi di Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 270 juta lebih, tentu pemerintah disini harus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

b. Kurangnya akses informasi

Para pencari kerja biasanya kesulitan dalam menemukan akses informasi terkait perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Apalagi di zaman sekarang, rata-rata perusahaan dalam mencari tenaga kerja atau membuka lowongan melalui media digital dan informasi.

c. Kualitas SDM yang rendah

Keterampilan atau keahlian merupakan salah satu aspek yang terpenting di dunia kerja. Apalagi zaman semakin maju dan perusahaan-perusahaan tentu membutuhkan tenaga kerja yang berkompeten sesuai dengan bidang pekerjaannya. Maka dari itu pemerintah disini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang bermutu

dan juga pemberian pelatihan soft skill terhadap para tenaga kerja.

d. Faktor budaya atau kebiasaan malas

Sikap malas merupakan salah satu penyakit yang biasanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kebiasaan malas dapat membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang atau kesempatan bekerja.

### 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

#### 1) Pengertian IPM

Indeks Pembangunan Manusia atau biasa disingkat IPM, merupakan sebuah indikator dalam mengukur pencapaian kualitas hidup manusia yang tinggal di suatu wilayah. Pada tahun 1990 *United Nations Development Programme* (UNDP) menekankan betapa pentingnya unsur manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan di suatu wilayah. IPM terbentuk dari 3 komponen utama pembangunan manusia, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak (BPS,2020).

Menurut BPS dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah, terdapat beberapa pengelompokan diantaranya sebagai berikut :

- a. Kelompok sangat tinggi :  $IPM \geq 80$
- b. Kelompok tinggi :  $70 \leq IPM < 80$
- c. Kelompok sedang :  $60 \leq IPM < 70$

- d. Kelompok rendah : IPM < 60

Dalam menghitung skor Indeks Pembangunan Manusia menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

- 2) Indikator pembentuk IPM

- a. Angka Harapan Hidup saat Lahir

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah angka rata-rata banyaknya tahun seorang individu untuk dapat hidup dari lahir sampai mati. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tidak langsung karena sulitnya mengkutti data kematian setiap tahunnya. Dalam menghitung Angka Harapan Hidup (AHH), menggunakan 2 data yaitu data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Dalam menghitung indeks harapan hidup menggunakan rumus dari *United Nations Development Programme* (UNDP) yang mana membandingkan nilai maksimum dan minimum harapan hidup. Angka maksimum harapan hidup adalah 85 tahun dan angka minimumnya 20 tahun.

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ max} - AHH \text{ min}}$$

- b. Tingkat Pendidikan

Dalam mengukur tingkat pendidikan, indicator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*means years of schooling*) dan

harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan penduduk yang berusia 25 tahun keatas dalam menjalankan pendidikan formalnya. Untuk batasan yang digunakan dalam perhitungannya yaitu maksimal 15 tahun dan minimal 0 tahun. Sedangkan harapan lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun lamanya menjalankan pendidikan formal yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun. Batasan yang digunakan adalah maksimal 18 tahun dan minimal 0 tahun.

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ max} - HLS \text{ min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ max} - RLS \text{ min}}$$

$$I_{Pengetahuan} = \frac{HLS - RLS \text{ min}}{2}$$

c. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk karena dampak perekonomian yang membaik. Dalam penghitungannya, standar hidup layak diukur melalui pegeluaran perkapita disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Paritas daya beli dihitung berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok. Sedangkan batasan yang digunakan dalam menghitung indek pengeluaran ini adalah maksimal Rp.26.572.353 dan minimal Rp.1.007.436.

$$IPengeluaran = \frac{\ln(Pengeluaran) - \ln(Pengeluaran \min)}{\ln(Pengeluaran \max) - \ln(Pengeluaran \min)}$$

### 3) Human Capital Theory

Secara definisi human capital merupakan sekumpulan aspek yang meliputi pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kontribusi dalam menghasilkan nilai ekonomi. Human capital merupakan suatu konsep yang bermula dari pemikiran bahwa manusia merupakan asset yang tak berwujud (*intangible asset*). Terdapat beberapa alasan kenapa manusia disebut asset tidak berwujud yaitu, *Pertama* kemampuan manusia tidak akan pernah berkurang, bahkan kemampuan tersebut dapat bertambah atau berkembang. *Kedua* manusia dapat merubah data menjadi informasi yang berguna. *Ketiga* manusia mampu berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan pihak lain.

Human capital ini menekankan pentingnya investasi dalam peningkatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi yang bisa dilakukan biasanya berupa pendidikan atau pelatihan kepada para individu untuk meningkatkan skill atau pengetahuannya agar dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan output maksimal sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara (Arifin, 2023).

#### 4. Bantuan Sosial

##### 1. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial atau yang biasa sering disebut bansos merupakan suatu bantuan dari pemerintah berupa uang maupun barang yang diberikan kepada masyarakat atau golongan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan yang tidak bersifat secara terus menerus. Sedangkan untuk sumber dana yang digunakan untuk bansos telah diatur dalam Peraturan Menteri No.32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Untuk sasaran penerima bansos juga diatur dalam pasal 22 ayat 1 dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.32 Tahun 2011 yakni meliputi individu, keluarga, atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup (Rarun et al., 2018).

##### 2. Teori *Welfare State*

Secara istilah *welfare state* dapat diartikan sebagai negara kesejahteraan. Maksud dari negara kesejahteraan adalah sebuah model pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dengan pemberian peran penting kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dalam konsep *welfare state*, negara mengambil tanggung jawab penuh atas

kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu segala permasalahan yang ada di masyarakat baik masalah sosial maupun ekonomi harus dapat di atasi oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan demi tercapainya kesejahteraan.

Konsep *welfare state* berkaitan erat dengan kebijakan sosial (*sosial policy*) yang mencakup upaya atau strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya lewat perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menggunakan konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*. Hal ini juga sesuai dengan yang tertuang di pembukaan UUD 1945 yang mana terdapat salah satu tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Selain itu pada dasar negara yaitu Pancasila juga telah mencerminkan bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan (Effendi, 2017).

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen yang sesuai dengan konsep *welfare state* yang mana pemerintah memiliki peran dalam kesejahteraan masyarakatnya. Peran pemerintah dalam bansos ini yaitu dengan memberikan bantuan berupa barang, jasa, dan uang kepada masyarakatnya, khususnya masyarakat yang kurang mampu sehingga diharapkan dengan bantuan yang diberikan tersebut dapat menaikkan taraf hidup mereka agar dapat keluar dari permasalahan sosial. Bansos ini juga

merupakan tanggung jawab dari pemerintah dalam memelihara dan melindungi masyarakatnya agar terhindar dari risiko sosial. Selain itu bansos juga merupakan wujud usaha pemerintah demi tercapainya *welfare state* atau negara kesejahteraan.

### 3. Jenis-Jenis Bantuan Sosial

#### a. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan dari pemerintah berupa uang tunai atau kesempatan belajar bagi para pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu. PIP dirancang untuk memastikan anak-anak usia sekolah dari masyarakat yang kurang mampu tetap dapat akses pendidikan yang sama dengan anak-anak pada umumnya.

#### b. Program Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan sebuah program yang diselenggarakan pemerintah untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat baik yang mampu maupun tidak mampu. Program JKN ini dikelola oleh lembaga resmi dari pemerintah yaitu BPJS Kesehatan. Bantuan yang diberikan dari program JKN ini berupa rawat jalan, rawat inap, persalinan, obat-obatan, dan berbagai macam pemeriksaan medis lainnya.

c. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dari pemerintah dengan tujuan untuk membantu keluarga yang tidak mampu agar mereka bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Program ini memberikan bantuan secara tunai kepada para keluarga yang kurang mampu, tetapi dengan syarat tertentu seperti memastikan apakah anak-anak dalam keluarga tersebut bisa bersekolah atau tidak, memeriksa kesehatannya, dan lainnya.

d. Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan non tunai yang diberikan yaitu melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang dapat digunakan untuk belanja kebutuhan pangan lewat *e-waroong*. Dengan adanya BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan dan memberikan bahan pangan yang berkualitas dan bernutrisi bagi para KPM (Kemenko PMK, 2018).

## **B. Kajian Pustaka**

Penelitian yang membahas mengenai “*Analisis Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa*” belum ditemukan penelitian lain yang sama persis. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang membahas

tentang kemiskinan walaupun menggunakan salah satu atau dua dari variabel yang digunakan oleh peneliti.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nabibah & Hanifa (2023) menemukan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Artinya setiap kenaikan angka pengangguran, maka kemiskinan juga ikut naik. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah et al (2023) yang menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abubakar & Bato (2022) yang menemukan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Hal ini terjadi karena banyak penduduk yang melakukan urbanisasi ke Kota Makassar sehingga meningkatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu banyak masyarakat golongan bawah yang hanya mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah sehingga mereka merasa bahwa kehidupannya dapat tercukupi. Kondisi ini menyebabkan mereka malas untuk bekerja sehingga pengangguran semakin naik dan angka kemiskinan juga berpotensi naik walaupun lambat.

Penelitian yang dilakukan oleh Bawowo et al (2022) menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya setiap peningkatan angka IPM, dapat menurunkan kemiskinan. Sama halnya

dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2022) yang menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdi (2023) yang menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang berarti IPM bukan merupakan faktor utama dalam pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Takasaping (2023) menemukan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sanghie. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabilah & Sugiri (2022) yang menemukan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Melati et al (2021) yang menemukan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Artinya tidak ada pengaruh yang cukup besar dari bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan dan masih ada variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kemiskinan.

**Tabel 2. 1Kajian Literatur**

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	(Adam et al, 2022)	Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Kerjasama Utara-Utara	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> Pendidikan Pengangguran	Analisis Regresi Data Panel	Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan pendidikan dan pengangguran sama-sama berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan Utara-Utara.



No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
2	(Nabibah & Hanifa, 2022)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> Jumlah Penduduk Pengangguran Pendidikan	Analisis Regresi Data Panel	Jumlah penduduk (JP) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan (KM). Pengangguran (PG) berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan (KM). Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan (KM). Sedangkan secara bersama-sama, jumlah penduduk, pengangguran dan pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
3	(Hilmi et al, 2022)	Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> Jumlah Penduduk Pengangguran	Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan kedua variabel tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tolitoli.
4	(Jannah et al., 2023)	Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> Pengangguran	Analisis Regresi Data Panel	Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
5	(Abubakar & Bato, 2024)	Efek Tingkat Pengangguran, PDRB, IPM, dan PMA terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> Pengangguran PDRB IPM PMA	Analisis Regresi Data Panel	Pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan secara simultan seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar.

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
6	(Syahputra & Nasution 2024)	The effect of Education Level and Unemployment Rate on Poverty in Deli Serdang Regency	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> Pendidikan Pengangguran IPM Pendapatan	Analisis Regresi Data Panel	Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, dan Pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Deli Serdang.
7	(Bawowo et al., 2022)	Analisis Pengaruh Indek Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> IPM Pertumbuhan Ekonomi	Analisis Regresi Data Panel	Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
8	(Irfan et al, 2024)	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan	<b>Y:</b> Kemiskinan <b>X1:</b> Pertumbuhan Ekonomi <b>X2:</b> IPM <b>X3:</b> Tingkat Pengangguran <b>X4:</b> Ketimpangan Pendapatan	Analisis Regresi Data Panel	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Tingkat Pengangguran berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
9	(Rusdi, 2023)	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> IPM	Analisis Regresi Sederhana	IPM berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan.

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
10	(Handayani, 2024)	Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> IPM Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran	Analisis Regresi Data Panel	IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
11	(Fajriah, 2021)	Analysis of The Effect of Gross Regional Domestic Product, Number of Population, Regional Minimum Wage, Open Unemployment Rate, and Human Development Index on Poverty in 2010-2020 East Java Province	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> PDRB Jumlah Penduduk Upah Minimum Pengangguran IPM	Analisis Regresi Data Panel	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Upah minimum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan, Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
12	(Rahmawati et al., 2022)	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia)	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> IPM UMR TPT	Analisis Regresi Data Panel	IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, UMR berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.
13	(Takasaping et al., 2023)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> Pertumbuhan Ekonomi PDRB Perkapita Belanja Bantuan Sosial	Analisis Regresi Linear Berganda	Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan Belanja Bantuan Sosial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
					Kepulauan Sanghie.
14	(Melati M et al., 2021)	Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan Belanja Bansos	Analisis Regresi Data Panel	Belanja Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Belanja Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan Belanja Bansos berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
15	(Nabilah & Sugiri, 2022)	Apakah Bantuan Sosial dan Belanja Modal Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> Belanja Bansos Belanja Modal	Analisis Regresi Data Panel	Belanja Bansos memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.
16	(Fadhl & Nazila, 2023)	Pengaruh Bantuan Sosial BPNT Dan PKH Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> Bansos BPNT Bansos PKH	Analisis Regresi Linear Berganda	Bansos BPNT memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan dan bansos PKH memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan bansos BPNT dan PKH memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
17	(Rarun et al., 2018)	Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> Belanja Bansos Investasi Swasta	Metode Analisis Ordinary Less Square (OLS)	Belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kemiskinan dan Investasi Swasta memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. secara bersama-sama bantuan sosial dan Investasi Swasta memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.
18	(Alfath et al., 2025)	Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	<b>Dependen</b> Kemiskinan <b>Independen</b> Belanja Bansos Belanja Subsidi	Analisis Regresi Linear Berganda	Belanja bantuan sosial memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan Belanja subsidi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

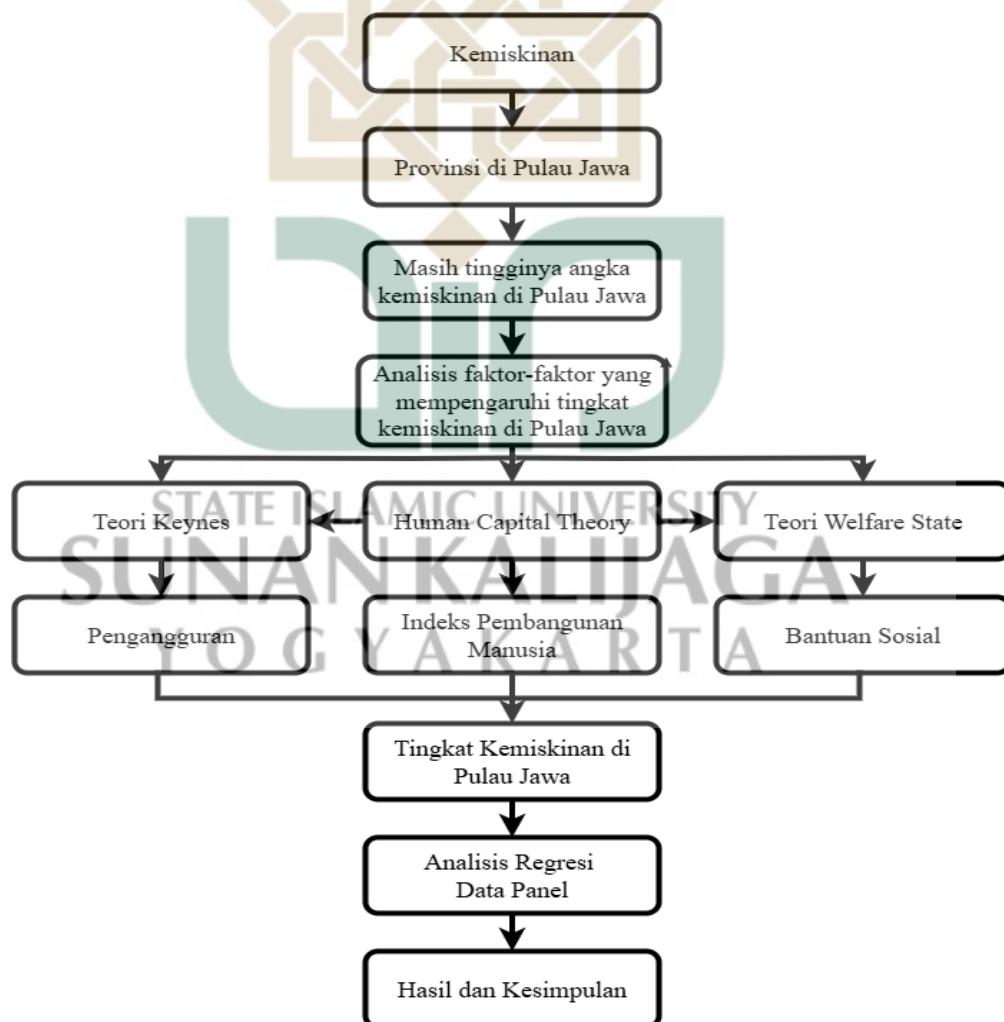
Sumber: Penulis, 2025

## C. Kerangka Teoritik dan Pengembangan Hipotesis

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori pada penelitian ini adalah pengangguran sebagai variabel independen (X1), indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel independen (X2), bantuan sosial sebagai variabel independen (X3) dan kemiskinan sebagai variabel dependen (Y). Berikut terdapat kerangka pemikiran yang digambarkan pada penelitian ini :

**Gambar 2. 2 Kerangka Teoritik**



*Sumber: Penulis, 2025*

## 2. Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan

Pengangguran merupakan sebuah kondisi dimana seorang individu tidak atau belum memiliki pekerjaan. Ketika seseorang tidak bekerja, otomatis tidak memiliki pendapatan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Kondisi ini jika terjadi secara terus menerus dapat menimbulkan masalah baru yakni kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, pengangguran memiliki hubungan terhadap kemiskinan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Adam et al, 2022) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan Utara-Utara. Artinya semakin tinggi tingkat pengangguran maka tingkat kemiskinan juga akan naik. Pengangguran memang memiliki dampak negatif yakni dapat menurunkan tingkat pendapatan sehingga mengurangi tingkat kesejahteraan. Hal ini dikarenakan mereka para pengangguran tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari karena tingkat pendapatan mereka yang rendah. Kondisi ini pada akhirnya akan menimbulkan kemiskinan.

Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahputra & Nasution 2024) yang juga menemukan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kemiskinan di Deli Serdang. Maka dari itu, Hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu :

**H1 : Terdapat pengaruh positif dari Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa.**

## **2. Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indikator dalam menentukan atau mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan IPM mencerminkan perbaikan dalam beberapa aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Layanan pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan kesempatan kerja yang terbuka dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan sehingga angka kemiskinan juga menurun karena terdapat peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Maka dari itu IPM memiliki pengaruh atau hubungan terhadap kemiskinan (Febriani Sagala et al., 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mukhtar et al, 2019) menemukan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya semakin tinggi IPM maka tingkat kemiskinan turun atau rendah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irfan et al, 2024) yang juga menemukan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kab/kota di Provinsi

Sulawesi Selatan. Maka dari itu, Hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu :

**H2 : Terdapat pengaruh negatif dari IPM terhadap tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa.**

### **3. Pengaruh bantuan sosial terhadap kemiskinan**

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen atau kebijakan dari pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat miskin dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah juga dapat meningkatkan daya beli sehingga mampu mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Maka dari itu bantuan sosial memiliki hubungan terhadap kemiskinan (Alfath et al., 2025).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Takasaping, 2023) menemukan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sangghe. Artinya ketika belanja bantuan sosial meningkat kemiskinan juga akan turun, tetapi secara statistik belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nabila & Sugiri 2022) yang mana menemukan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan

di Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu, Hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu :

**H3 : Terdapat pengaruh negatif dari Bantuan Sosial terhadap tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa.**

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas dapat dijelaskan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan, dan variabel bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Tujuan Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah metode untuk menguji atau menganalisis teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel yang diukur dengan instrumen-instrumen penelitian sehingga data yang berupa angka tersebut dapat dianalisis sesuai prosedur statistik (Cresswell, 2012). Dalam penelitian kuantitatif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: (1) pengujian hipotesis, (2) populasi dan sampel, (3) instrument penelitian, dan (4) analisis statistik (Kusumawati, 2015).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel independen yaitu pengangguran ,indeks pembangunan manusia, dan bantuan sosial terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data panel. Periode waktu yang digunakan pada penelitian ini yaitu 6 tahun, dari 2018-2023. Data crossection yang diambil pada penelitian ini yaitu 119 kabupaten/kota yang berasal dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa

Timur, DIY, DKI Jakarta, dan Banten . Data pada penelitian ini bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tiap provinsi.

### **C. Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2014) populasi diartikan sebagai suatu wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Secara umum populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu untuk diteliti dan diambil kesimpulannya. Populasi bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh provinsi yang terdapat di Pulau Jawa

Sampel merupakan bagian dari jumlah atau karakteristik yang dipilih dari populasi dan telah mewakili dari keseluruhan populasi. Sampel ini digunakan untuk efisiensi waktu, dana, dan tenaga jika populasi yang digunakan besar atau banyak, sehingga peneliti tidak perlu meneliti keseluruhan populasi yang besar tersebut, cukup dengan mengambil beberapa sampel dari populasi (Suriani et al., 2023). Pada penelitian ini sampel yang digunakan merupakan sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2018) sampel jenuh atau istilah lainnya sensus merupakan suatu teknik dalam menentukan sampel jika semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Penggunaan sampel jenuh ini juga dapat meminimalisir kesalahan dalam sampling dan bias dalam pemilihan sampel.

#### D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) definisi operasional variabel yaitu segala sesuatu yang bisa berbentuk apa saja yang telah ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari agar dapat diperoleh informasinya kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen (variabel terikat) dan tiga variabel independen (variabel bebas). Variabel dependen pada penelitian ini adalah kemiskinan, sedangkan variabel independennya yaitu pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), dan bantuan sosial. Berikut adalah uraian dari variabel-variabel pada penelitian ini:

**Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Rumus	Satuan
1	Kemiskinan	Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan dan non pangan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS,2020)	Garis Kemiskinan (GK)	$GK=GKM + GKNM$	persen (%)
2	Pengangguran	Pengangguran adalah seseorang yang digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$TPT=JP/JAK \times 100\%$	persen (%)

		mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. (Sukirno,2006)			
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. (BPS,2024)	Skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<b>IPM= 1/3 (IK x IPND x IPGL)</b>	Indeks
5	Bantuan Sosial	Bantuan sosial merupakan suatu layanan publik dari pemerintah yang diberikan kepada penduduk atau rumah tangga miskin atau kurang mampu. (Suharto,2015)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	-	Jiwa

Sumber: Penulis,2025

Keterangan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**GKM : Garis Kemiskinan Makanan**

**GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan**

**JP : Jumlah Pengangguran**

**JAK : Jumlah Angkatan Kerja**

**IK : Indeks Kesehatan**

**IPND : Indeks Pendidikan**

**IPGL : Indeks Pengeluaran**

## E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel (*panel pooled data*) yang diolah menggunakan software E-Views 9.0. Analisis regresi data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* merupakan sekumpulan data yang dicatat pada interval waktu tertentu, sedangkan data *cross section* merupakan sekelompok data dari beberapa objek penelitian yang berada di waktu yang sama. Data *cross section* yang digunakan pada penelitian ini merupakan data dari 119 kabupaten/kota di provinsi yang ada di Pulau Jawa, sedangkan untuk data *time series* pada penelitian ini yaitu data yang diambil dari tahun 2018-2023. Adapun model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

Y	: Garis Kemiskinan
I	: Kabupaten/Kota di Pulau Jawa (1,...119)
t	: Waktu (tahun 2018,...2023)
X1	: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
X2	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
X3	: Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
a	: Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	: Koefisien regresi
$\epsilon_{it}$	: Variabel penganggu (Error term)

## 1. Model Regresi Data Panel

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam mengestimasi model dengan regresi data panel, yaitu :

### a. Common Effect Model (CEM)

*Common Effect Model* (CEM) adalah suatu pendekatan model regresi data panel yang paling sederhana daripada model yang lainnya. Model ini hanya mengkombinasikan antara data *time series* dan *cross section*. Model ini juga tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu (Henukh & Atti, 2022). Metode yang digunakan dalam mengestimasi model ini yaitu *Ordinary Least Square* (OLS)

Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = a + X_{1i} + X_{2i} + X_{3i} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

$i$  : 119 kabupaten/kota di pulau Jawa (cross section)

$t$  : Tahun 2018,2020,...,2023 (time series)

### b. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) merupakan metode regresi data panel dengan menambahkan variabel dummy. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan ini dapat diakomodasi lewat perbedaan intersepnya. Maka dari itu, dalam model FEM setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi menggunakan teknik variabel dummy. Metode ini

sering disebut dengan Least Square Dummy Variabel (LSDV) (Salsabila et al., 2022). Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + e_{it}$$

### c. Random Effect Model (REM)

*Random Effect Model* (REM) merupakan metode regresi data panel yang mana variabel gangguan kemungkinan saling berhubungan antar waktu dan individu. Pada *Fixed Effect Model* dapat menimbulkan masalah yaitu berkurangnya nilai derajat kebebasan (degree of freedom) yang mengakibatkan pengurangan efisiensi parameter, sehingga muncul *Random Effect Model* yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dari *Fixed Effect Model* (Alamsyah et al., 2022). Dalam mengestimasi model ini dapat menggunakan metode *Generalized Least Square* (GSL) atau *Error Component Model* (ECM). Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

## 2. Uji Spesifikasi Model

Dalam menentukan model yang terbaik, terdapat 3 uji spesifikasi model yang digunakan, diantaranya sebagai berikut :

### a. Uji Chow

Uji Chow merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk menentukan atau membandingkan model terbaik antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) dalam estimasi data

panel. Dalam pengambilan keputusan pemilihan model ini dilihat dari nilai *probability cross section* F. Adapun rumus dalam menentukan F hitung yaitu :

$$F_{hitung} = \frac{\frac{SSE_1 - SSE_2}{(n-1)}}{\frac{SSE_2}{(nt-n-k)}}$$

$$F_{tabel} = \{ \alpha : df(n-1, nt-k) \}$$

Keterangan :

$SSE_1$  : Sum Square error common effect

$SSE_2$  : Sum Square error fixed effect

$n$  : jumlah individu

$nt$  : Jumlah perkalian time series dan cross section

$\alpha$  : Signifikansi

Dalam Uji Chow terdapat ketentuan diantaranya sebagai berikut :

- Jika nilai probability cross section  $F > 0,05$ , maka model yang dipilih yaitu common effect model (CEM).
- Jika nilai probability cross section  $F < 0,05$ , maka model yang dipilih yaitu fixed effect model (FEM).

### b. Uji Hausman

Uji Hausman atau yang sering disebut dengan Hausman test digunakan untuk menentukan model terbaik antara Random Effect Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM) dalam estimasi data panel. Dalam pengambilan keputusan pemilihan model ini dilihat *dari nilai*

*probability cross section random.* Adapun rumusan hipotesisnya, diantaranya yaitu :

$H_0$  : Terpilih random effect model

$H_1$  : Terpilih fixed effect model

Sedangkan pengujian statistik Uji Hausman yaitu :

$$\mathbf{W} = \mathbf{q} [\text{var} (\mathbf{q})]^{-1} = (\boldsymbol{\beta}_{FEM} - \boldsymbol{\beta}_{REM}) [\text{var} (\boldsymbol{\beta}_{FEM} - \boldsymbol{\beta}_{REM})]^{-1} (\boldsymbol{\beta}_{FEM} - \boldsymbol{\beta}_{REM})$$

Keterangan :

$\mathbf{W}$  : Probabilitas

$\boldsymbol{\beta}_{FEM}$  : Vektor estimasi slope FEM

$\boldsymbol{\beta}_{REM}$  : Vektor estimasi slope REM

Dalam Uji Hausman terdapat ketentuan diantaranya sebagai berikut :

- Jika nilai probability cross section random  $< 0,05$ , artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Maka dengan demikian model yang terpilih adalah fixed effect model.
- Jika nilai probability cross section random  $> 0,05$ , artinya  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Maka dengan demikian model yang terpilih adalah random effect model.

### c. Uji Langrange Multiple

Uji Langrange Multiple (LM) digunakan untuk menentukan model terbaik antara Random Effect Model (REM) dan Common Effect Model (CEM). Uji Lagrange Multiplier tidak digunakan atau dapat diabaikan jika pada Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan pemilihan model

Fixed Effect Model (FEM). Adapan rumusan hipotesisnya diantaranya yaitu :

$H_0$  : Terpilih random effect model

$H_1$  : Terpilih fixed effect model

Sedangkan pengujian statistik Uji Lagrange Multiple yaitu :

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[ \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

Keterangan :

$n$  : Jumlah unit cross section

$T$  : Jumlah Periode

$e$  : Residual

Dalam Uji Lagrange Multiple terdapat beberapa ketentuan dalam pemilihan model yaitu :

- Jika nilai probabilitas Breusch Pagan  $> 0,05$  , artinya  $H_0$  diterima.

Maka dengan demikian model yang terpilih yaitu common effect model.

- Jika nilai probabilitas Breusch Pagan  $< 0,05$  , artinya  $H_0$  ditolak.

Maka dengan demikian model yang terpilih yaitu random effect m

### 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan suatu pengujian dengan tujuan untuk memastikan model regresi yang digunakan valid dan tepat atau istilah lainnya yaitu BLUE ( Best Linier Unbiased Estimator ) *Best*, artinya model regresi menghasilkan hasil yang terbaik dan error yang kecil. *Linear*, artinya

model regresi yang digunakan sesuai dengan kaidah model Ordinary Least Square (OLS) yaitu linear. *Unbiased*, artinya nilai dari hasil estimasi model regresi tidak bias. *Estimator*, artinya model regresi yang dibuat memiliki varians yang minimal dari estimator lainnya. Terdapat 4 jenis Uji Asumsi Klasik diantaranya sebagai berikut :

**a. Uji Normalitas**

Uji Normalitas merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam suatu model regresi terdistribusi normal atau tidak. Menurut Suliyanto (2011:69) terdapat beberapa metode dalam melakukan Uji Normalitas, salah satunya yaitu Uji Normalitas dengan Jarque-Bera (JB-Test), adapun rumus estimasinya adalah sebagai berikut :

$$JB = \frac{n}{6} \left[ SK^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right]$$

Keterangan :

$S$  : Koefisien Skewness

$K$  : Koefisien Kurtosis

$n$  : Jumlah sampel

Untuk menguji apakah data terdistribusi normal, terdapat uji hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Data memiliki distribusi normal

$H_1$  : Data tidak memiliki distribusi normal

Sedangkan keputusan pengujian berdasarkan nilai probabilitas (p-value) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika p-value < 0,05, maka  $H_0$  ditolak, sehingga data dianggap tidak terdistribusi normal.
- Jika p-value > 0,05, maka  $H_0$  diterima, sehingga data dianggap terdistribusi normal.

### b. Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas merupakan uji statistik yang digunakan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel yang digunakan. Jika dalam model regresi yang diuji memiliki korelasi yang tinggi atau sempurna pada variabel bebas, maka model regresi tersebut dinyatakan terkena gejala multikolinearitas. Untuk mendeteksi multikolinearitas sebuah model regresi dapat dilakukan suatu uji dengan melihat nilai tolerance dalam Variance Inflation Factor (VIF) dengan rumus sebagai berikut :

$$VIF = \frac{1}{1-R_j^2}$$

Keterangan :

$R^2$  : Koefisien Determinasi

j : Jumlah sampel

Untuk menentukan apakah terdapat multikolinearitas dalam sebuah model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Jika nilai tolerance > 0,08, maka terdapat indikasi multikolinieritas.
- Jika nilai tolerance < 0,08 maka tidak terdapat indikasi multikolinieritas.

### c. Uji Heteroskesdastisitas

Uji Heteroskesdastisitas merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji model regresi yang memiliki ketidaksamaan varians dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskesdastisitas dapat muncul karena terdapat varian pada variabel model regresi yang tidak sama. Terdapat beberapa metode pengujian Heteroskesdastisitas, salah satunya yaitu Uji Lagrange Multiplier (LM), Adapun rumus dari Uji LM sebagai berikut :

$$LM = \frac{T}{2} \sum_{i=1}^n \frac{\sigma_i^2}{\sigma^2} - 1$$

Keterangan :

T : Jumlah data time series

N : Jumlah data cross section

$\sigma_i^2$  : Variance residual persamaan ke-i

$\sigma^2$  : Variance residual persamaan sistem

Dalam pengambilan keputusan Uji LM dilakukan dengan memperhatikan nilai probabilitas chi-square dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika nilai probabilitas chi-square  $> 0,05$  maka tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas.
- Jika nilai probabilitas chi-square  $< 0,05$  maka terdapat indikasi heteroskesdastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan uji statistic yang digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya t-1. Uji Autokorelasi ini muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan. Permasalahan ini muncul karena residuall tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Pengujian dalam Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan pengujian nilai Durbin Watson (DW). Adapun rumus yang digunakan untuk Uji DW yaitu :

$$DW = \sum \left( \frac{(e_t - e_{t-1})^2}{e_t^2} \right)$$

Hasil dari Uji Durbin-Watson dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Jika nilai DW kurang dari -2, maka terjadi autokorelasi positif, yang berarti terdapat hubungan kuat antar residual dalam model.
- Jika nilai DW berada dalam rentang -2 hingga 2, maka tidak ada autokorelasi, sehingga model memenuhi asumsi regresi yang baik.
- Jika nilai DW lebih dari 2, maka terjadi autokorelasi negative, yang mengindikasikan adanya pola tertentu dalam residual yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi.

### 4. Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh individu dari masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Pengujinya dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikansi 5%. Adapun rumus uji t adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_i}{SE(\beta_i)}$$

Hasil dari Uji t dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Jika nilai t hitung  $> t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak, artinya bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai t hitung  $< t$  tabel, maka  $H_0$  diterima, artinya bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### b. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur kualitas model regresi yang diestimasi. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Adapun rumus Uji  $R^2$  adalah sebagai berikut :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

Skala Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai  $R^2$  mendekati 1, maka variabel independen memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Kondisi Geografis Pulau Jawa

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia dengan luas sebesar 128.297 km<sup>2</sup>. Dengan luas sebesar itu, membuat Pulau Jawa menduduki peringkat ke 5 sebagai pulau terbesar di Indonesia dan peringkat 13 sebagai pulau terbesar di dunia. Secara astronomis Pulau Jawa terletak diantara 113°48'10" - 113°48'26" BT (Bujur Timur) dan 7°50'10" - 7°56'41" LS (Lintang Selatan) dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di bagian selatan, Selat Sunda di bagian barat, Laut Jawa di bagian utara, dan Selat Bali di bagian timur. Pulau Jawa merupakan pulau yang sebagian besar wilayahnya terbentuk dari aktivitas vulkanik, sehingga terdapat deretan gunung berapi yang membentuk jajaran dan terbentang dari timur hingga barat pulau ini.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	Luas (km <sup>2</sup> )
Jawa Tengah	34.337,49
Jawa Timur	48.036,84
Jawa Barat	37.044,86
DIY	3.170,65
DKI Jakarta	660,98

Banten	9.352,77
--------	----------

*Sumber : BPS, 2024*

Secara administratif Pulau Jawa terdiri dari enam provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, DKI Jakarta, dan Banten, dengan memiliki 119 kabupaten/kota yang tersebar. Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi terbesar yang ada di Pulau Jawa dengan luas sebesar  $48.036,84 \text{ km}^2$ , diikuti dengan Provinsi Jawa Barat dengan luas sebesar  $37.044,86 \text{ km}^2$ , Provinsi Jawa Tengah dengan luas sebesar  $34.337,49 \text{ km}^2$ , Provinsi Banten dengan luas sebesar  $9.352,77 \text{ km}^2$ , Provinsi DIY dengan luas sebesar  $3.170,65 \text{ km}^2$ , dan yang terakhir provinsi DKI Jakarta dengan luas sebesar  $660,98 \text{ km}^2$ .

Pulau Jawa memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data terakhir dari BPS, pada tahun 2024 Pulau Jawa memiliki kontribusi PDRB sekitar 57%. Dengan angka sebesar ini tidak heran jika menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian nasional. Terdapat beberapa sektor unggulan yang dimiliki Pulau Jawa seperti sektor sekunder (industri, listrik, gas, air bersih, serta kontruksi) dan sektor tersier (perdagangan, pengangkutan keuangan, dan jasa-jasa). Selain beberapa sektor tersebut, Pulau Jawa juga memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dan perkebunan karena memiliki tanah yang subur, sehingga dapat ditanami berbagai macam tumbuhan. Bahkan karena hal ini membuat Pulau Jawa juga menjadi lumbung pangan nasional.

## 2. Kondisi Kependudukan Pulau Jawa

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia dengan populasi yang cukup besar. Bahkan hampir sekitar 60% total penduduk yang ada di Indonesia, tinggal di Pulau Jawa. Secara angka jumlah penduduk yang ada di Pulau Jawa sekitar 150 juta jiwa dan memiliki luas hanya 7% dari total keseluruhan wilayah di Indonesia, sehingga dengan kondisi ini menjadikan Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terpadat karena harus menampung hampir setengah dari total penduduk di Indonesia.

**Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Provinsi di Pulau Jawa  
(ribu jiwa)**

Provinsi	2021	2022	2023	2024
Jawa Tengah	36.516	36.811,1	37.180,4	37.892,3
Jawa Timur	40.665,7	40921,1	41.230	41.814,5
Jawa Barat	48.274,2	48.738,8	49.306,8	50.345,2
DIY	3.668,7	3.687,8	3.712,6	3.759,5
DKI Jakarta	10.562,1	10.605,4	10.640	10.684,9
Banten	11.904,6	12.023	12.167	12.431,4

*Sumber : BPS,2024*

Tabel di atas merupakan data jumlah penduduk dari masing-masing provinsi yang ada di Pulau Jawa selama empat tahun terakhir. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam periode tersebut hampir setiap provinsi terus mengalami kenaikan jumlah penduduk pada setiap tahunnya. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah

penduduk terbanyak, bahkan di tahun lalu 2024 berada di angka 50.345,2 ribu jiwa. Di tahun yang sama yaitu 2024, Provinsi DIY menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terendah di angka hanya 3.759,5 ribu jiwa. Selain itu beberapa provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten bahkan masuk ke dalam 5 besar Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia (Luthfia, n.d.).

## B. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik data sampel pada masing-masing variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini, objek penelitian dilakukan pada seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa yang terdiri dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, DKI Jakarta, dan Banten. Adapun periode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dalam kurun waktu 6 tahun, dari tahun 2018-2023. Sedangkan untuk jumlah observasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 714 observasi. Berikut adalah data statistik yang diperoleh dari hasil olah data menggunakan software *Eviews 9*:

**Tabel 4. 3 Hasil Statistik Deskriptif**

	Kemiskinan ( % )	TPT ( % )	IPM (%)	KPM (jiwa)
Mean	9.675294	6.083810	73.07524	277486.4
Median	9.465000	5.705000	71.98500	114312.5
Maximum	23.76000	14.29000	88.61000	2424961.
Minimum	1.680000	0.910000	61.00000	1307.000
Std. Dev.	4.041935	2.566864	5.403898	361621.5
Skewness	0.542118	0.460871	0.536841	2.188577

Kurtosis	3.097354	2.544581	2.552541	8.378918
Jarque-Bera	35.25511	31.44616	40.25207	1430.744
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	6908.160	4343.840	52175.72	1.98E+08
Sum Sq. Dev.	11648.45	4697.808	20821.10	9.32E+13
Observations	714	714	714	714

Sumber : Olah Data Eviews 9, 2025

Tabel 4.3 di atas merupakan hasil olah data statistik deskriptif pada penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa pada variabel kemiskinan menghasilkan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 9.675294, nilai *median* sebesar 9.465, nilai *maximum* (tertinggi) sebesar 23.76, dan nilai *minimum* (terendah) sebesar 1,68. Wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa pada periode 2018-2023 yaitu Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan wilayah dengan angka kemiskinan terendah pada periode tersebut yaitu Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada nilai *standar deviasi* menghasilkan angka sebesar 4,041935.

Variabel TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) menghasilkan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 6,083810, nilai *median* sebesar 5,705, nilai *maximum* (tertinggi) sebesar 14,29, dan nilai *minimum* (terendah) sebesar 0,91. Wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Jawa yaitu Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedangkan wilayah dengan tingkat pengangguran terendah yaitu Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Pada nilai *standar deviasi* menghasilkan angka sebesar 2,566864.

Variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) menghasilkan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 73,07524, nilai *median* sebesar 71,985, nilai maximum (tertinggi) sebesar 88,61, dan nilai *minimum* (terendah) sebesar 61. Wilayah dengan skor IPM tertinggi di Pulau Jawa yaitu Kota Yogyakarta, Provinsi DIY. Sedangkan wilayah dengan skor IPM terendah yaitu Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Pada nilai *standar deviasi* menghasilkan angka sebesar 5,402898.

Variabel KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menghasilkan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 277.486,4, nilai *median* sebesar 114312,5, nilai maximum (tertinggi) sebesar 2424961, dan nilai *minimum* (terendah) sebesar 1307. Selain itu Wilayah dengan jumlah KPM tertinggi di Pulau Jawa yaitu Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedangkan wilayah dengan jumlah KPM terendah yaitu Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Pada nilai *standar deviasi* menghasilkan angka sebesar 361621,5.

### C. Estimasi Regresi Data Panel

#### 1. Uji Pemilihan Model

Uji pemilihan model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang digunakan dalam analisis regresi data panel. Dalam uji spesifikasi model terdapat tiga model pengujian yaitu sebagai berikut :

##### a. Uji *Chow*

Uji *chow* dilakukan untuk mengetahui model yang terbaik antara model FEM (*Fixed Effect Model*) atau model CEM (*Common Effect Model*). Dalam uji *chow* jika nilai probabilitas *cross-section*

*chi-square* > 0,05 maka model yang terpilih adalah CEM. Jika nilai probabilitas *cross-section chi-square* < 0,05 maka model yang terpilih adalah FEM. Berikut adalah hasil uji *chow* menggunakan software *Eviews 9*:

**Tabel 4. 4 Uji Chow**

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	172.138133	(118,592)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	2544.841305	118	0,0000

*Sumber : Olah Data Eviews 9, 2025*

Berdasarkan tabel hasil olah data di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section chi-square* sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga model yang terpilih dalam uji ini yaitu FEM.

**b. Uji *Hausman***

Uji *hausman* dilakukan untuk mengetahui model yang terbaik antara model FEM (*Fixed Effect Model*) atau REM (*Random Effect Model*) dengan melihat nilai probabilitas *cross-section random*. Jika nilai probabilitas *cross-section random* > 0,05 maka model yang terpilih adalah REM. Jika nilai probabilitas *cross-section random* < 0,05 maka model yang terpilih adalah FEM. Berikut adalah hasil uji *hausman* menggunakan software *Eviews 9*:

**Tabel 4. 5 Uji Hausman**

<b>Test Summary</b>	<b>Chi-Sq. Statistic</b>	<b>Chi-Sq. d.f</b>	<b>Prob</b>
<i>Cross-section</i> <i>Random</i>	102.101615	3	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews 9, 2025

Berdasarkan tabel hasil olah data di atas dapat diketahui bahwa nilai *cross-section random* sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga model yang terpilih dalam uji ini yaitu FEM.

#### c. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk mengetahui model yang terbaik antara model CEM (*Common Effect Model*) atau REM (*Random Effect Model*) dengan melihat nilai probabilitas *cross-section breusch-pagan*. Jika nilai probabilitas *cross-section breusch-pagan*  $> 0,05$  maka model yang terpilih adalah CEM. Jika nilai probabilitas *cross-section breusch-pagan*  $< 0,05$  maka model yang terpilih adalah REM. Berikut adalah hasil uji *lagrange*

*Multiplier* menggunakan software *Eviews 9*:

**Tabel 4. 6 Uji Lagrange Multiplier**

<b>Test Hypothesis</b>	
	<i>Cross-section</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	1394.303
	0,0000

Sumber : Olah Data Eviews 9, 2025

Berdasarkan tabel hasil olah data di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section breusch-pagan* sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga model yang terpilih dalam uji ini yaitu REM.

*Berdasarkan ke tiga hasil uji pemilihan model di atas, dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih yang digunakan pada penelitian ini yaitu Fixed Effect Model (FEM).*

## 2. Uji Asumsi Klasik

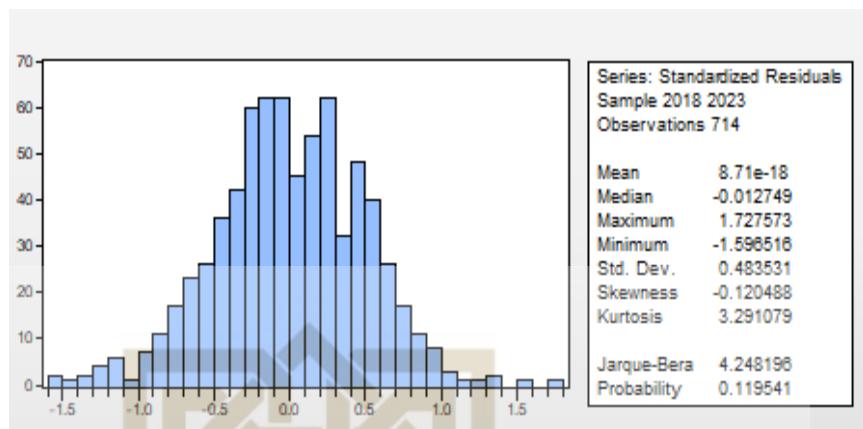
Uji asumsi klasik merupakan serangkaian uji statistik pada analisis regresi data panel yang mana dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar agar hasil analisis valid. Selain itu pemenuhan hasil uji asumsi klasik bertujuan agar menghasilkan kriteria data yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Terdapat beberapa uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik menggunakan

### STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat nilai residual dari seluruh variabel yang digunakan yaitu variabel kemiskinan, variabel pengangguran, variabel IPM (*Indeks Pembangunan Manusia*), dan variabel bantuan sosial. Dalam menentukan hasil uji normalitas, penelitian ini menggunakan uji *Jaque Bera* dengan hasil sebagai berikut:

**Gambar 4. 1 Uji Normalitas**



Sumber : Olah Data Eviews 9, 2025

Berdasarkan gambar hasil uji normalitas di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar  $0,119541 > 0,05$  yang artinya data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal dan telah memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*).

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel yang digunakan pada penelitian. Pada uji ini dilihat dengan mengetahui nilai *tolerance*. Jika nilai *tolerance*  $> 0,8$  maka data yang digunakan pada penelitian terindikasi multikolinearitas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas :

**Tabel 4. 7 Uji Multikolinearitas**

	TPT	IPM	KPM
TPT	1.000000	0.148352	0.022993
IPM	0.148352	1.000000	-0.237803
KPM	0.022993	-0.237803	1.000000

Sumber : Olah Data Eviews 9, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas di atas, diketahui bahwa nilai *tolerance* yang dihasilkan sebesar 0.148352, 0.022993, dan 0.59489. Nilai *tolerance* yang dihasilkan dari data tersebut  $< 0,8$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak terindikasi multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi antar variabel dalam penelitian.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji model regresi yang memiliki ketidaksamaan varians dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika pada residual terjadi kesamaan, maka data yang digunakan pada penelitian tidak terindikasi heteroskedastisitas. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam uji heteroskedastisitas, salah satunya yaitu uji park yang digunakan pada penelitian ini dengan melihat nilai probabilitas masing-masing variabel. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka data yang digunakan terindikasi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas:

**Tabel 4. 8 Uji Heteroskesdasitas**

<b>Variabel</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std.Error</b>	<b>t-statistic</b>	<b>Prob.</b>
C	0.031496	0.037378	0.842612	0.3998
TPT	-0.000371	0.000315	-1.179103	0.2388
IPM	-0.000243	0.000517	-0.471258	0.6376
KPM	-8.58E-10	1.41E-09	-0.607297	0.5439

Sumber : Olah Data Eviews 9, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas variabel TPT (Tingkat Penganggiran Terbuka) sebesar  $0,2388 > 0,05$ , variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar  $0,6376 > 0,05$ , dan variabel KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebesar  $0,5439 > 0,05$ . Artinya semua variabel pada penelitian ini tidak ada yang terindikasi masalah heteroskedastisitas dan data yang digunakan telah memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya t-1. Sedangkan alat uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji *Durbin Watson* dengan melihat nilai *Durbin Watson* (D-W). Terdapat beberapa ketentuan dalam uji *Durbin Watson* yaitu sebagai berikut:

- Angka D-W  $< -2$ : autokorelasi positif
- Angka D-W diantara -2 sampai 2: tidak ada autokorelasi
- Angka D-W  $>$  dari 2 : autokorelasi negative

Berikut adalah hasil uji autokorelasi berdasarkan olah data menggunakan *software Eviews 9*:

**Tabel 4. 9 Uji Autokorelasi**

<i>Durbin-Watson stat</i>	1.538256
---------------------------	----------

*Sumber : Olah Data Eviews 9, 2025*

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi di atas, diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1.538256. Nilai tersebut berada diantara -2 dan 2 yang artinya data pada penelitian ini tidak terindikasi autokorelasi dan data yang digunakan telah memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

### 3. Uji Hipotesis

Setelah data dinyatakan lolos dari uji asumsi klasik, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk menguji kebenaran dari hipotesis (dugaan) dari penelitian dan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen. Terdapat 2 uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji t dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Berikut adalah hasil dari uji hipotesis pada penelitian ini:

#### a. Uji t

Uji t adalah sebuah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui signifikansi dan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu atau parsial. Dalam pengambilan keputusan didasarkan pada nilai p-value dari setiap

variabel. Jika nilai p-value  $< 0,05$  maka variabel dependen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji t pada penelitian ini:

**Tabel 4. 10 Uji t**

<i>Variabel</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std.Error</i>	<i>t-statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	14.52851	2.101143	6.914577	0.0000
TPT	0.117752	0.017682	6.659571	0.0000
IPM	-0.075880	0.029038	-2.613093	0.0092
KPM	-8.89E-08	7.94E-08	-1.120544	0.2629

*Sumber : Olah Data Eviews 9, 2025*

Berdasarkan hasil uji t di atas, diketahui bahwa variabel TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$  dan diperkuat dengan nilai t-hitung sebesar  $2,03244 > t$ -tabel dengan koefisien determinasi sebesar  $0,117752$  yang artinya  $H_1$  diterima.

Variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,0092 < 0,05$  dan diperkuat dengan nilai t-hitung sebesar  $2,03244 > t$ -tabel dengan koefisien determinasi sebesar  $0,075880$  yang artinya  $H_1$  diterima.

Variabel KPM (Keluarga Penerima Manfaat) memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,2692 > 0,05$  dan memiliki nilai t-hitung  $2,02344 < t$ -tabel dengan koefisien determinasi sebesar  $8,89$  yang artinya  $H_3$  ditolak.

### b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kualitas model regresi yang diestimasi. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen dalam sebuah penelitian. Berikut hasil uji  $R^2$  pada penelitian ini:

**Tabel 4. 11 Uji  $R^2$**

<i>R-squared</i>	0.985689
<i>Adjusted R-squared</i>	0.982764

*Sumber : Olah Data Eviews 9, 2025*

Berdasarkan hasil uji  $R^2$  di atas, diketahui bahwa nilai  $R^2$  squared sebesar 0,985689 yang artinya bahwa sekitar 98% dari tingkat kemiskinan di Pulau Jawa mampu dijelaskan dengan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan sekitar 2% sisanya dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

## D. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan.

Berdasarkan hasil Uji Hipotesis diketahui bahwa variabel TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$  yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, dan juga memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,117752 yang berarti Pengangguran

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2018-2023. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa setiap peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1% maka akan meningkatkan angka kemiskinan sebesar 0,122569.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam teori Keynes bahwa rendahnya permintaan agregat yang terdiri dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor netto. Kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan akan mengurangi jumlah produksinya. Produksi yang rendah membuat perusahaan harus melakukan pengurangan karyawan untuk mengurangi biaya produksi dan pada akhirnya terjadilah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kemudian terciptalah pengangguran.

Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adam et al (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kawasan Kerja Sama Utara-Utara” menyatakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pengangguran memiliki dampak terhadap tingkat pendapatan nasional. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan otomatis pendapatan juga akan berkurang. Kondisi ini jika berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama akan menimbulkan kemiskinan karena seseorang tersebut

tidak memiliki pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

Hal yang sama juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Irfan et al (2024) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan” menyatakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dan pertumbuhan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di Pulau Jawa. Seperti yang diketahui bahwa Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak, bahkan hampir sekitar 60% dari total jumlah penduduk di Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Padatnya penduduk yang tinggal di Pulau Jawa tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada, sehingga hal ini membuat sebagian tenaga kerja tidak dapat terserap ke beberapa sektor pekerjaan yang ada . Kondisi ini dapat meningkatkan angka pengangguran di Pulau Jawa.

## **2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan.**

Berdasarkan hasil Uji Hipotesis diketahui bahwa variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,0092 < 0,05$  yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, dan juga memiliki nilai koefisien determinasi sebesar  $-0,075880$  yang berarti IPM memiliki

pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2018-2023. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa setiap peningkatan IPM sebesar 1% maka akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,075880.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Amartya Sen bahwa pembangunan manusia merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Menurut sen keberhasilan pembangunan manusia ditentukan oleh dua faktor yaitu pendidikan dan kesehatan. Faktor tersebut merupakan faktor utama dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin baik akses pendidikan dan layanan kesehatan yang didapatkan individu, maka kemampuan individu untuk melakukan kegiatan yang produktif seperti bekerja juga akan meningkat dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat tentu kualitas hidup juga dapat meningkat sehingga berpotensi untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Matondang et al (2024) dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara” menyatakan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan manusia memiliki pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. IPM yang merupakan alat ukur pembangunan manusia,

memiliki beberapa indikator seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi perkapita. Indikator tersebut dapat terpenuhi jika sektor pendidikan dan kesehatan dapat ditingkatkan karena kedua sektor ini merupakan kunci utama daripada pembangunan manusia. Jika masyarakat dapat mendapatkan akses pendidikan yang layak dan fasilitas kesehatan yang memadai tentu dapat menciptakan individu yang berkualitas memiliki pengetahuan, sehat, dan yang terpenting produktif sehingga kesejahteraan meningkat dan terhindar dari kemiskinan.

Hal yang sama juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Prasetyoningrum & Sukmawati (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengaguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia” menyatakan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa produktivitas kerja manusia diukur dari IPM. Semakin tinggi IPM maka dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki manusia. Manusia yang berkompeten memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatannya sehingga dengan pendapatan yang tercukupi tentu dirinya dapat memenuhi kebutuhan dasar dan dapat memiliki kehidupan yang layak.

Di Pulau Jawa sendiri menunjukkan capaian IPM yang relatif tinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Bahkan menurut data terbaru dari BPS (2024) bahwa beberapa provinsi di Pulau

Jawa seperti Provinsi DIY, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat masuk ke dalam 10 besar provinsi di Indonesia dengan skor IPM tertinggi. Hal tersebut juga mencerminkan kualitas pembangunan manusia yang baik di Pulau Jawa, terutama dalam 3 aspek utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Maka tidak heran jika sampai saat ini menjadi pusat pembangunan nasional, meskipun pemerintah juga harus tetap melakukan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah di Indonesia.

### **3. Pengaruh Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan.**

Berdasarkan hasil Uji Hipotesis diketahui bahwa variabel KPM (Keluarga Penerima Manfaat) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2629  $> 0,05$  yang artinya  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, dan juga memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,117752 yang berarti bantuan sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2018-2023.

Hasil penelitian tersebut kurang sesuai dengan teori *welfare state* yang mana mengatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakatnya lewat beberapa kebijakan yang dibuat, salah satunya yaitu bantuan sosial. Seperti yang diketahui bahwa bantuan sosial merupakan salah satu instrumen dari pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan secara tunai maupun non tunai kepada masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan. Seharusnya dengan adanya bantuan sosial dari

pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan sehingga angka kemiskinan dapat menurun.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabilah & Sugiri (2022) dengan judul “Apakah Bantuan Sosial dan Belanja Modal Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?” menyatakan bahwa variabel belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pada pelaksanaanya bantuan sosial terdapat beberapa kendala seperti pendistribusianya yang kurang tepat sasaran. Selain itu cukup banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum terdata oleh Kementerian Sosial sehingga mereka tidak mendapat bagian bantuan sosial yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Maka dari itu bantuan sosial tidak memiliki dampak yang signifikan dalam pemberantasan kemiskinan.

Distribusi memang menjadi permasalahan utama dalam efektivitas penyaluran bantuan sosial. Masih terdapat sebagian masyarakat yang seharusnya menjadi penerima tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial karena ketidakmerataan distribusi. Bahkan terdapat juga beberapa kasus yang mana masyarakat yang bukan penerima justru mendapatkan bantuan sosial. Permasalahan dalam pendistribusian bantuan sosial ini biasanya dikarenakan ketidakakuratan data masyarakat penerima bantuan. Hal ini tentu menjadi tanggung

jawab pemerintah agar melakukan evaluasi terkait pendataan untuk masyarakat penerima bantuan. Selain ketidakakuratan dalam pendataan, terdapat faktor lain yang menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran seperti kurangnya sosialisasi dan informasi tentang mekanisme bantuan sosial sehingga masih terdapat masyarakat kurang mampu yang belum paham atau bahkan belum tahu tentang program bantuan sosial dari pemerintah (Ariansyah et al., 2025).

